



PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN GALANG

JL.BATIN LIMAT NO.24 SEMBULANG
GALANG - BATAM



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA
KECAMATAN GALANG
TAHUN 2024**



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~197~~ TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GALANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Galang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GALANG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

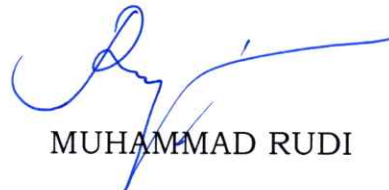
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

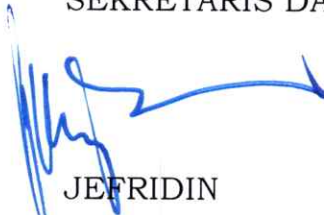
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1537

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan perubahan Renja Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2024

Keberadaan rencana kerja ini merupakan suatu langkah bagi kecamatan Galang dalam rangka mewujudkan Visi Kota Batam yaitu ” **Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”**

Diharapkan rencana kerja ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam setiap pengambilan langkah maupun kebijakan Kecamatan Galang. Dengan demikian akan terciptakan keterpaduan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program – program kerja guna tercapainya visi dan misi Kecamatan Galang Kota Batam.

Di masa mendatang, sangat diharapkan pula masukan dan sasaran perbaikan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan rencana kinerja periode selanjutnya.

Akhir kata, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galang Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik kami harapkan untuk penyempurnaan ke depannya



Batam, 15 Juli 2024
Camat Galang,

UTE RAMBE, S E
PENATA TK.I

N I P. 19730503 199403 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN I | 1

1.1 LATAR BELAKANG I | 1

1.2 LANDASAN HUKUM I | 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... I | 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN I | 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA OPD SAMPAI TRIWULAN

II..... II | 1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH..... III | 1

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PD..... III | 1

3.2 PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH III | 4

3.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN. III | 7

BAB V PENUTUP VI | 1

LAMPIRAN :

- SK Tim Penyusun Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Galang TA 2024;

- Formulir E.70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Kota Batam..... 23

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Galang Kota Batam..... 37

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Galang Kota Batam..... 41

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Galang Kota Batam.....

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Batam..... 19

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024..... 10

Tabel 4.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024..... 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyusunan Renja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Perubahan RENJA Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD Kecamatan Galang Kota Batam merupakan dokumen perencanaan kerja Kecamatan Galang selama 1 (satu) tahun anggaran. Renja ini merupakan penjabaran dari beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Galang pada Tahun Anggaran 2024. Dalam proses penyusunannya didasarkan atas sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Kecamatan Galang Kota Batam dengan usulan rencana *Bottom Up* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam. Selain itu juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota, Reses DPRD dengan memperhatikan

skala prioritas kegiatan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam tahun 2021-2026.

Renja PD Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 dan tahun berjalan 2023, serta memuat program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Dokumen RKPD Pemerintah Kota Batam. RKPD ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam. Dari uraian tersebut terlihat jelas adanya keterkaitan yang sangat erat antara Renja Perangkat Daerah, Dokumen RKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2024 adalah :

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121).
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Instruksi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Khusus untuk Kecamatan dan Perkimtan)
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
28. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
29. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
30. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
32. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
33. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
34. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
35. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
36. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
37. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
38. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
46. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
54. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
56. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
57. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
58. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
59. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

- (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
60. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
61. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
62. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
63. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
64. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
65. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
66. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 242 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2021-2026
67. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024
68. Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA.2024, Tanggal 22 Agustus 2024, Lembaran Daerah Nomor 4
69. Perwako Nomor 204 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA, 2024, Berita Daerah Nomor 1544.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kota Batam selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2024 meliputi :

1. Program dan kegiatan Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2023.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2023.
3. Indikator kinerja Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2023.
4. Kelompok sasaran Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2023.

5. Pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Galang Kota Batam Tahun Anggaran 2023.

Secara umum tujuan penyusunan Renja Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan Perangkat Daerah dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2024 adalah :

1. Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Galang Tahun 2024.
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Galang Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Galang Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Galang Tahun 2024.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH s/d TRIWIULAN II

- 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Hasil Inputan SIPD)

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Trwiulan II

Berdasarkan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galang sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024, diperoleh Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 masuk kategori Baik yaitu sebesar 50,00%.

Namun demikian, masih ada sub kegiatan yang realisasi kinerjanya masih 0%, yaitu:

1. Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan
Alasan tidak terealisasi dikarenakan belum terlaksana
2. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Alasan tidak terealisasi dikarenakan belum terlaksana
3. Subkegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Alasan tidak terealisasi dikarenakan belum terlaksana
4. Sub kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alasan tidak terealisasi dikarenakan belum terlaksana

Adapun hasil evaluasi rencana kerja Kecamatan Galang sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Galang disajikan pada Tabel 2.1.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2024
OPD : KECAMATAN GALANG
Triwulan : II

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (JUNI 2024)		KETERANGAN
												TW 2		
												KINERJA	Rp.	
1	2					3	4	5	6	7	8	15		18
						KECAMATAN GALANG						50%	15.666.168.797	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						50%	15.666.168.797	
	7	1				KECAMATAN						50%	10.117.276.493	
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah					9.769.789.194,00	8.673.200.194,00	
	7	1	1	2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi			50%	8.396.791.047	
	7	1	1	2	1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50%	8.396.791.047	

	7	1	1	2	3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0%	0	
	7	1	1	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana			0%	0	
	7	1	1	2	2				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0%	0	
	7	1	1	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana			50%	6.000.000,00	
	7	1	1	2	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	

	7	1	1	2	5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0%	0	
	7	1	1	2			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi			0	0	
	7	1	1	2	5				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	
	7	1	1	2	6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	
	7	1	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi			50%	137.766.986	

	7	1	1	2	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32.868.060	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	186.645.806	
	7	1	1	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi				20.000.000,00	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	20.000.000,00	

	7	1	1	2	6					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	
	7	1	1	2	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 1. % RT/RW/LPM aktif;					50%	408.880.000,00	
	7	1	2	2				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			50%	408.880.000,00	
	7	1	2	2	1					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	36.880.000,00	

	7	1	2	2	2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	372.000.000,00	
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentase Warga yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;					0	
	7	1	3	2			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			0,00	0,00	

	7	1	3	2	5				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0,00	0,00	
	7	1	3	2	6				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0,00	0,00	

		7	1	3	2	7				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	
4	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						50%	433.984.000	
		7	1	5	2			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan			50%	433.984.000	

	7	1	5	2	1				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	
--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---	--

	7	1	5	2	4				Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3500 Orang	381.384.000,00	
	7	1	5	2	8				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	52.600.000,00	
						KELURAHAN REMPANG CATE					50%	35.971.220	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					50%	35.971.220	
	7	1				KECAMATAN					50%	35.971.220	
5	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				50%	35.971.220	
	7	1	1	2				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		0%	0,00	

	7	1	1	2	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0%	0	
	7	1	1	2				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		50%	35.971.220	

	7	1	1	2	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50%	10.000.000,00	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50%	25.971.220	
6	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;				0%	0	
	7	1	3	2				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun"		0%	0	

	7	1	3	2	1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0%	0	
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0%	0	
	7	1	3	2	3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0%	0	
	7	1	3	2				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		0%	0	

	7	1	3	2	3				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0%	0	
	7	1	3	2	5				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0%	0	

	7	1	3	2	6				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0%	0	
	7	1	3	2	7				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0%	0	

	7	1	3	2	8				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0%	0	
	7	1	3	2	9				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0%	0	
						KELURAHAN SIJANTUNG					50%	249.927.138	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					50%	249.927.138	
	7	1				KECAMATAN					50%	249.927.138	
7	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				50%	32.620.138	

	7	1	1	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana			0%	0	
	7	1	1	2	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0%	0	

	7	1	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi			50%	64.609.638,00	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50%	5.030.012	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50%	27.590.126	
8	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;				50%	2.005.452.000	

	7	1	3	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun"			50%	2.005.452.000	
	7	1	3	2	1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	16.583.500,00	
	7	1	3	2	2				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50%	1.982.350.000	
	7	1	3	2	3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0%	0	

	7	1	3	2			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			50%	23.102.000,00	
	7	1	3	2	3				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		-	
	7	1	3	2	5				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		-	

	7	1	3	2	6				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		-	
	7	1	3	2	7				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50%	23.102.000	

	7	1	3	2	8				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0%	0	
	7	1	3	2	9				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0%	0	
	7	1	3	2	9								
						KELURAHAN SUBANG MAS					50%	1.507.984.220	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					50%	1.507.984.220	
	7	1				KECAMATAN					50%	1.507.984.220	
10	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah					37.303.220	

	7	1	1	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				12.732.000	
	7	1	1	2	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50%	12.732.000	
	7	1	1	2	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0%	0	

	7	1	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi			50%	34.571.220	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50%	8.600.000	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50%	25.971.220	
11	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya				50%	1.460.681.000	
	7	1	3	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras			50%	1.460.681.000	

									Kelurahan yang Dibangun"							
	7	1	3	2	1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0%	0,00				
	7	1	3	2	2				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1.460.681.000				
	7	1	3	2	3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0%	0,00				

	7	1	3	2			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			0%	0,00	
	7	1	3	2	3				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0%	0,00	
	7	1	3	2	5				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0%	0,00	

	7	1	3	2	6				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0%	0,00	
	7	1	3	2	7				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0%	0,00	

	7	1	3	2	8				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0%	0,00	
	7	1	3	2	9				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0%	0,00	
						KELURAHAN AIR RAJA					50%	28.084.610	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					50%	28.084.610	
	7	1				KECAMATAN					50%	28.084.610	
12	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				50%	28.084.610	

	7	1	1	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana			50%	9.549.000	
	7	1	1	2	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50%	9.549.000	
	7	1	1	2	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	
	7	1	1	2	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	

	7	1	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi			50%	18.535.610	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.550.000	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12.985.610	
13	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentse Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;				0	0%	
	7	1	3	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras			0	0%	

									Kelurahan yang Dibangun"					
	7	1	3	2	1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	0%		
	7	1	3	2	2				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0%		
	7	1	3	2	3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0%		

	7	1	3	2			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			0	0%	
	7	1	3	2	3				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	0%	
	7	1	3	2	5				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	0%	

	7	1	3	2	6				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	0%	
	7	1	3	2	7				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0%	

	7	1	3	2	8				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	0%	
	7	1	3	2	9				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0	0%	
						KELURAHAN SEMBULANG					50%	298.426.820	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					50%	298.426.820	
	7	1				KECAMATAN					50%	298.426.820	
14	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				50%	12.450.000	

	7	1	1	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana			0%	0	
	7	1	1	2	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0%	0	

	7	1	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi			50%	52.766.820	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	10.800.000	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	41.966.820	
15	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;				50%	245.600.000	
	7	1	3	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras			50%	245.600.000	

									Kelurahan yang Dibangun"							
	7	1	3	2	1					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0%	0			
	7	1	3	2	2					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0			
	7	1	3	2	3					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50%	245.600.000			

	7	1	3	2			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			0%	0	
	7	1	3	2	3				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0%	0	
	7	1	3	2	5				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0%	0	

	7	1	3	2	6				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0%	0	
	7	1	3	2	7				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0%	0	

	7	1	3	2	8				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0%	0	
	7	1	3	2	9				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0%	0	
						KELURAHAN KARAS					50%	1.699.150.138	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					50%	1.699.150.138	
	7	1				KECAMATAN					50%	1.699.150.138	
16	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				50%	24.032.000	

	7	1	1	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana			50%	3.138.000	
	7	1	1	2	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20%	12.687.000	
	7	1	1	2	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0%	0	

	7	1	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi				55.463.138	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		8.200.000	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		47.263.138	
17	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya				20%	1.630.955.000	
	7	1	3	2			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya			0%	0	

	7	1	3	2	1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0%	0	
	7	1	3	2	2				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1.630.955.000	
	7	1	3	2	3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0%	0	
	7	1	3	2			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			0%	0	
	7	1	3	2	3				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0%	0	

	7	1	3	2	5				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0%	0	
	7	1	3	2	6				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0%	0	

	7	1	3	2	7				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
	7	1	3	2	8				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			

	7	1	3	2	9				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			
						KELURAHAN PULAU ABANG					50%	938.756.880	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					50%	938.756.880	
	7	1				KECAMATAN					50%	938.756.880	
18	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50%	60.866.880	
	7	1	1	2				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		50%	11.310.000	
	7	1	1	2	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0%	0	

	7	1	1	2	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50%	11.310.000	
	7	1	1	2	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0%	0	
	7	1	1	2				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		50%	49.106.880	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50%	9.200.000	

	7	1	1	2	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50%	39.915.880	
19	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;				50%	1.149.499.000	
	7	1	3	2				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun"		50%	1.149.499.000	
	7	1	3	2	1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0%	0	

	7	1	3	2	2				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50%	1.149.499.000	
	7	1	3	2	3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0%	0	
	7	1	3	2			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			0%	0	
	7	1	3	2	3				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0%	0	

	7	1	3	2	5				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0%	0	
	7	1	3	2	6				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0%	0	

	7	1	3	2	7				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0%	0	
	7	1	3	2	8				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0%	0	

	7	1	3	2	9				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0%	0	
						KELURAHAN GALANG BARU					50%	1.938.458.258	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					50%	1.938.458.258	
	7	1				KECAMATAN					50%	1.938.458.258	
20	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					50%	18.802.258	
	7	1	1	2				Administrasi Umum Perangkat Daerah			0%	0	
	7	1	1	2	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0%	0	

	7	1	1	2	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0%	0	
	7	1	1	2	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0%	0	
	7	1	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi			50%	18.802.258	
	7	1	1	2	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50%	11.500.000	

	7	1	1	2	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50%	7.302.258	
21	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya					1.919.656.000	
	7	1	3	2				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	"Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun"		50%	1.919.656.000	
	7	1	3	2	1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		15.633.000,00	

	7	1	3	2	2				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50%	1.919.656.000	
	7	1	3	2	3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	
	7	1	3	2			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			0	0	
	7	1	3	2	3				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	0	

	7	1	3	2	5				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	0	
	7	1	3	2	6				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	0	

	7	1	3	2	7				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	
	7	1	3	2	8				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	0	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Guna mencapai visi dan misi tersebut diatas maka Kecamatan Galang Kota Batam menetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, serta target kinerja sebagaimana table 3.2 berikut:

3.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Galang Kota Batam

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			
				2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publikkecamatan Galangyangakuntabel dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.00%	88.31%	89.00%	90.00%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%

ULASAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2024 KOTA BATAM

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GALANG

ULASAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KOTA BATAM

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GALANG

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN			LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CA
1	2			3	4	5	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	1.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kecamatan Galang Kota Batam	1. Persentase sarana dan persarana kelurahan yang dibangun		
	.				2. Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan		
		1.1.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rempang Cate	Kelurahan Rempang Cate Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	
		1.1.1.2	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan Sijantung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	

			2	Pembangunan Jalan Beton dari Simpang Rumah Fabianus sampai Rumah Agus Sijantung RT.001 RW.001	Sijantung RT.001 RW.001		433 M2	
			3	Pembangunan Jalan Beton dari Tikungan Ismail sampai Rumah Alom Air Naga RT.002 RW.004	Air Naga RT.002 RW.004		400 M2	
			4	Pembangunan Jerambah Beton dari Bibir Pantai Sampai Rumah Piah dan Asran Pulau Panjang RT.003 RW.003	Pulau Panjang RT.003 RW.003		80 M2	
			5	Pembangunan Jerambah Beton dari Bibir Pantai Sampai Rumah Durahman Pulau Panjang RT.001 RW.002	Pulau Panjang RT.001 RW.002		80 M2	
			6	Pembangunan Jerambah Beton dari Bibir Pantai Sampai Rumah Jasni dan Abu Bakar Pulau Panjang RT.002 RW.002	Pulau Panjang RT.002 RW.002		80 M2	
			7	Pembangunan Jerambah Beton dari bibir Pantia Sampai Rumah Herman Pl.Semukit RT.001 RW.004	Pl.Semukit RT.001 RW.004		80 M2	
			8	Pembangunan Jerambah Beton dari Bibir Pantai Sampai Rumah Sandra dan Kaharudin Pulau Panjang RT.003 RW.003	Pulau Panjang RT.003 RW.003		80 M2	
			9	Pembangunan Jerambah Beton dari Bibir Pantai Sampai Rumah Jais Pulau Panjang RT.001 RW.002	Panjang RT.001 RW.002		80 M2	
			10	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Sijantung RT.002 RW.001	Sijantung RT.002 RW.001		80 M2	
			1	Pembangunan Jerambah Beton dari Bibir Pantai Sampai Rumah	Pulau Panjang RT.004		80 M2	

		1.1.1.3 .	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Subang Mas		Kelurahan Subang Mas, Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	
			1	Pembangunan Jalan Beton Kampung Baru, RT.004/RW.002, Kel. Subang Mas	Kampung Baru, RT.004/RW.002, Kel. Subang Mas		400 M2	
			2	Pembangunan Jalan Beton Tg. Kalok RT.003/RW.002, Kel. Subang Mas	Tg. Kalok RT.003/RW.002, Kel. Subang Mas		300 M2	
			3	Pembangunan Jalan Beton Penurun, RT.006/RW.001, Kel. Subang Mas	Penurun, RT.006/RW.001, Kel. Subang Mas		500 M2	
			4	Pembangunan Jalan Beton Subang Mas, RT.001/RW.001, Kel. Subang Mas	Subang Mas, RT.001/RW.001, Kel. Subang Mas		400 M2	
			5	Pembangunan Jalan Beton Subang Mas, RT.001/RW.001, Kel. Subang Mas	Subang Mas, RT.001/RW.001, Kel. Subang Mas		500 M2	
			6	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Baru, (Rumah Kamat, Rafoiah, Baharadin, abun), RT.004/RW.002, Kel. Subang Mas	Kampung Baru, RT.004/RW.002, Kel. Subang Mas		90 M2	
			7	Pembangunan Jerambah Beton Kp. Baru, RT.004/RW.002, 3(tiga) titik (Rumah Jaka, Iskandar, Sapri), Kel.Subang Mas	Kp. Baru, RT.004/RW.002,Kel.Subang Mas		118.5 M2	
			8	[-] Pembangunan Jerambah Beton Tg. Kalok RT.003/RW.002, (Rumah Sulaiman, Nuryana, Poton lik), RT.003/RW.002 Kel. Subang Mas	Tg. Kalok RT.003/RW.002, Kel. Subang Mas		100 M2	
			9	Pembangunan Jerambah BetonTg. Kalok RT.003/RW.002, (Rumah Arivanto, Acua, Acua)	Tg. Kalok RT.003/RW.002, Kel. Subang Mas		120 M2	

		1.1.1.4 .	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Raja		Kelurahan Air Raja, Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	
			1	Pembangunan Jalan Beton Air Raja RT 002, RW 002. Dari Jalan Pak Kaspan s/d Jalan Pak Cahyadi	Air Raja RT 002, RW 002		500 M2	
			2	Pembangunan Jalan Beton Air Raja RT 002, RW 002. Dari Masjid Al Hidayah s/d Jalan Psantren	Air Raja RT 002, RW 002		500 M2	
			3	Pembangunan Jalan Beton Air Raja RT 003, RW 001. Dari Jalan Heri s/d Jalan Pak Ngasmo	Air Raja RT 003, RW 001		500 M2	
			4	Pembangunan Batu Miring Air Raja RT 001, RW 001. Dari Kuburan s/d Salo	Air Raja RT 001, RW 001		175.5 M2	
			5	Pembangunan Parit Pasangan Batu Air Raja RT 002, RW 001. Dari Jalan Soyah s/d Jalan Masjid Nurul Haq	Air Raja RT 002, RW 001		500 M2	
			6	Pembangunan Parit Pasangan Batu Air Raja RT 002, RW 002. Dari Jalan Bejo s/d Simpang Pak Ruba''i	Air Raja RT 002, RW 002		500 M2	
			7	Pembangunan Parit Pasangan Batu Air Raja RT 002, RW 002. Dari Simpang Pak Kaspan	Air Raja RT 002, RW 002		500 M2	
			8	Pembangunan Parit Pasangan Batu Air Raja RT 002, RW 001. Dari Jalan Warsito s/d Jalan Pak Ngasmo	Air Raja RT 002, RW 001		500 M2	
			9	Pembangunan Parit Pasangan Batu Air Raja RT 002, RW 001. Dari Jalan Pak Ngasmo s/d Pantai	Air Raja RT 002, RW 001		500 M2	

			1 1	Pembangunan Parit Pasangan Batu Air Raja RT 002, RW 001. Dari Simpang Lima s/d Jalan Pak Pungut/Soyah	Air Raja RT 002, RW 001		500 M2	
		1.1.1.5 .	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sembulang		Kelurahan Sembulang, Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	
		1.1.1.6 .	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karas		Kelurahan Karas, Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	
			1	Pembangunan Jalan Beton Kp.Batu Putih RT 001 RW 004 dari Rumah Anwar s/d Rumah Laboh	Kp.Batu Putih RT 001 RW 004		372 M2	
			2	Pembangunan Jalan Beton Kp.Padang RT 002 RW 003 dari Rumah Jalil s/d Rumah Roslan	Kp.Padang RT 002 RW 003		300 M2	
			3	Pembangunan Jalan Beton Kp.Padang Penaga RT 001 RW 006 dari parit SMP 13 s/d bukit pln	Kp.Padang Penaga RT 001 RW 006		450 M2	
			4	Pembangunan Jalan Beton Kampung Darat Pulau RT 001 RW 001 dari Rumah Abd.Kadir s/d Rumah Ida	Kampung Darat Pulau RT 001 RW 001		315 M2	
			5	Pembangunan Jalan Beton Kp.Ranga RT 002 RW 004 dari Tanah Siti s/d Polindes	Kp.Ranga RT 002 RW 004		300 M2	
			6	Pembangunan Jalan Beton Kp.Langgang RT 001 RW 002 dari MCK s/d Rumah Pak Asni	Kp.Langgang RT 001 RW 002		390 M2	
			7	Pembangunan Jalan Beton Kp.Batu Putih RT 003 RW 004 dari Tanah Ibrahim s/d Pohon Mangga	Kp.Batu Putih RT 003 RW 004		390 M2	
				Pembangunan Batu Miring				

				RW 003 dari Pantai Ahmad s/d Parit				
			10	Pembangunan Batu Miring Pemukiman Kp.Darat Pulau RT 002 RW 001 dari Rumah Salam s/d Rumah Mansor	Kp.Darat Pulau RT 002 RW 001		120 M2	
			11	Pembangunan Batu Miring Pemukiman Kp.Air Mas RT 002 RW 002 dari Tanjung s/d Lahan M.Amin	Kp.Air Mas RT 002 RW 002		120 M2	
			12	Pembangunan Batu Miring Pemukiman Kp.Padang Penaga RT 001 RW 006 dari parit SMP 13 s/d bukit pln	Kp.Padang Penaga RT 001 RW 006		150 M2	
			13	Pembangunan Batu Miring Pemukiman Pulau Mubut RT 001 RW 005 dari Rumah Tidjo s/d Rumah Zamru	Pulau Mubut RT 001 RW 005		112,5 M2	
		1.1.1.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Abang		Kelurahan Pulau Abang, Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	
			1	Semenisasi Jalan Lingkungan RT 004 RW 001 Pulau Abang	RT 004 RW 001 Pulau Abang		400 M2	
			2	Semenisasi jalan lingkungan dari belakang pentas ke perigi minum Pulau Abang RT.002 RW.001 Kel.Pulau Abang	Pulau Abang RT.002 RW.001		375 M2	
			3	Semenisasi jalan lingkungan petong barat RT.001 RW.003 kel.Pulau Abang	petong barat RT.001 RW.003 kel.Pulau Abang		375 M2	
			4	Jerambah Beton dari Rumah M Jaes Kerumah Rosmawi Pulau Abang RT.002 RW.001 Kel.Pulau Abang	Pulau Abang RT.002 RW.001		100 M2	
			5	Jerambah beton dari Rahman ke Rumah Aden Pulau Abang	Pulau Abang RT.003		100 M2	

			7	Jerambah beton dari rumah Bujang ke rumah Riko Air Saga RT.002, RW.002 Air saga, Kel.Pulau Abang	Air Saga RT.002, RW.002		90 M2	
			8	Jerambah beton dari rumah Ravi ke rumah Talip Petong Barat RT.001, RW.003, Kel. Pulau Abang	Petong Barat RT.001, RW.003		56 M2	
			9	Jerambah beton dari pantai kerumah Wardi Petong Utara RT.002, RW.003, Kel. Pulau Abang	Petong Utara RT.002, RW.003		60 M2	
			10	Jerambah beton dari rumah Dani kerumah Senin Air Saga RT.002, RW.002 Air saga, Kel.Pulau Abang	Air Saga RT.002, RW.002		75 M2	
			11	Batu miring tebing Petong Kelong Baru RT.002, RW.003, Kel. Pulau Abang	Petong Kelong Baru RT.002, RW.003		150 M2	
		1.1.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Galang Baru		Kelurahan Galang Baru, Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	
			1	Pembangunan Semensisasi Jalan Dari Rumah Warga ke Pemakaman Umum RT.001/RW.002 Pulau Nanga	RT.001/RW.002 Pulau Nanga		300 M2	
			2	Pembangunan Semensisasi Jalan Dari Rumah Nurdin Ke Pemakaman RT.002/RW.003 Tanjung Melagan	RT.002/RW.003 Tanjung Melagan		400 M2	
			3	Pembangunan Semensisasi Jalan Pemukiman RT.003/RW.004 Tanjung Cakang	RT.003/RW.004 Tanjung Cakang		600 M2	
			4	Pembangunan Jerambah Beton Dari Rumah Suden Ke Rumah Ardi RT.001/RW.001 Pulau Sembur	RT.001/RW.001 Pulau Sembur		90 M2	

			6	Pembangunan Jerambah Beton RT.002/RW.004 Pulau Nguan	RT.002/RW.004 Pulau Nguan		120 M2	
			7	Pembangunan Jerambah Beton RT.003/RW.005 Air Lingka	RT.003/RW.005 Air Lingka		130 M2	
			8	Pembangunan Jerambah Beton Dari Rumah Arifin Ke Rumah Roy RT.003/RW.006 Kampung Baru	RT.003/RW.006 Kampung Baru		120 M2	
			9	Pembangunan Batu Miring Penahan Tebing Darat RT.002/RW.001 Pulau Sembur	RT.002/RW.001 Pulau Sembur		150 M2	
			10	Pembangunan Batu Miring RT.002/RW.006 Kampung Baru	RT.002/RW.006 Kampung Baru		150 M2	
		1.1.2.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rempang Cate			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Ormas	
			-	Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kelurahan Rempang Cate, kota Batam			
			-	Pelatihan Membatik	Kelurahan Rempang Cate, kota Batam			
			-	Pelatihan Tata Rias	Kelurahan Rempang Cate, kota Batam			
			-	Sosialisasi Bahaya Sampah Plastik	Kelurahan Rempang Cate, kota Batam			
			-	Sosialisasi Layak Anak	Kelurahan Rempang Cate, kota Batam			
			-	Sosialisasi Pencegahan Stunting	Kelurahan Rempang Cate, kota Batam			
			-	Pelatihan Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4)	Kelurahan Rempang Cate, kota Batam			
		1.1.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rempang Cate			Jumlah Pokmas dan Ormas yang		

			-	Pelatihan Menjahit bagi Masyarakat Kelurahan Sijantung	kelurahan Sijantung, Kota Batam			
		1.1.2.3 .	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Subang Mas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Ormas	
			-	Pelatihan kader kesehatan masyarakat	Kelurahan Subang Mas, Kota Batam			
			-	Sosialisasi Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat	Kelurahan Subang Mas, Kota Batam			
		1.1.2.4 .	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Raja			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Ormas	
			-	Sosialisa dan Rembuk Stunting	Kelurahan Air Raja, Kota Batam			
			-	Pelatihan Membatik	Kelurahan Air Raja, Kota Batam			
		1.1.2.5 .	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sembulang			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Ormas	
			-	Sosialisa dan Rembuk Stunting	Kelurahan Sembulang, Kota Batam			
				Sosialisasi Gerakan Keamanan Pangan Desa	Kelurahan Sembulang, Kota Batam			
				Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kelurahan Sembulang, Kota Batam			
				Pelatihan Membatik	Kelurahan Sembulang, Kota Batam			

			-	Pelatihan Koperasi	Kelurahan Sembulang, Kota Batam			
			-	Pelatihan Penghayan dan Pengamalan Pancasila	Kelurahan Sembulang, Kota Batam			
			-	Pelatihan Kader PKK	Kelurahan Sembulang, Kota Batam			
			-	Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Sembulang, Kota Batam			
		1.1.2.6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Ormas	
			-	Pelatihan Membatik	Kelurahan Karas, Kota Batam			
			-	Pelatihan pengolahan limbah kerang	Kelurahan Karas, Kota Batam			
		1.1.2.7	Pemberdayaan Masyarakat di Pulau Abang			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Ormas	
			-	Sosialisa dan Rembuk Stunting	Kelurahan Pulau Abang, Kota Batam			
			-	Pelatihan Daur Ulang Sampah Plastik	Kelurahan Pulau Abang, Kota Batam			
		1.1.2.8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Galang Baru			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Ormas	
			-	Sosialisa dan Rembuk Stunting	Kelurahan Galang Baru, Kota Batam			

3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Hasil Inputan SIPD)

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan “*Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersifat Efektif, Demokratis dan Terpercaya*”.

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Galang Kota Batam menyusun Rencana kerja tahun 2024 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Galang Kota Batam tahun 2021-2026

Rencana Kerja Perubahan Pagu Indikatif tahun 2024 sebesar **Rp 38,670,693,973.00-**, yang terdiri dari **Rp 16,326,375,062.00-** untuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN sedangkan **Rp 22,344,318,911.00** untuk belanja Program dan Kegiatan, adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Galang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pememrintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah 19,031,566,607.00-

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Masukan input berupa dana Rp 16,326,375,062.00- dengan
Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun
dengan target realisasi sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Masukan input berupa dana Rp 297,970,500.00- dengan
Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Administrasi
Umum Kecamatan Galang selama 1 tahun dengan target
realisasi sebesar 100%.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Masukan input berupa dana Rp 1,150,967,985.00- dengan
Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kecamatan Galang
Masukan input berupa dana Rp 1,464,763,560.00- dengan
Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Galang
selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Masukan input berupa dana Rp 89,460,000.00- dengan
Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
selama 1 tahun dengan target realisasi sebesar 100%.

**B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
yaitu 1,776,918,000.00-**

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

Masukan input berupa dana Rp 1,776,918,000.00- deng
Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedian
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiat
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Verti
Terkait selama 1 tahun (8 kelurahan) dengan target realis
sebesar 100%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Masukan input berupa dana Rp 16,320,036,446.00- deng
Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Pemberdaya
Masyarakat Desa dan Kelurahan selama 1 Tahun dengan targ
realisasi sebesar 100%

**D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah yaitu 1,542,172,920.00-**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

Masukan input berupa dana Rp 1,542,172,920.00- deng
Indikator Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya Penyelenggan
Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daer
selama 1 Tahun dengan target realisasi sebesar 100%

Adapun rincian rencana kerja dan pendanaan Perubahan Kecamatan
Galang Kota Batam Tahun 2024 sebagaimana tabel 4.1 :

Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Galang

REKAP RKA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN GALANG

KODE	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU RANC PERUBAHAN KUA	SELISIH RANC PERUBAHAN KUA - MURNI
7.01.1.03.2.11.04.0000	7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG	36.826.374.047	38.670.693.973	1.844.319.926
7.01.1.03.2.11.04.0000	7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG	18.524.558.521	20.453.067.427	1.928.508.906
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.821.069.601	17.051.850.507	1.230.780.906
7.01.01.2.02	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.045.777.763	16.326.375.062	1.280.597.299
7.01.01.2.02.0001	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.045.777.763	16.326.375.062	1.280.597.299
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.826.285	128.826.285	0
7.01.01.2.06.0001	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.624.845	20.624.845	0
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.938.940	34.938.940	0
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000	55.000.000	0
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.762.500	17.762.500	0
7.01.01.2.06.0009	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000	500.000	0
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.005.553	507.189.160	-49.816.393
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.600.000	136.600.000	0
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.405.553	370.589.160	-49.816.393
7.01.01.2.09	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.460.000	89.460.000	0
7.01.01.2.09.0002	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.460.000	89.460.000	0

7.01.02	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.190.918.000	1.776.918.000	586.000.000
7.01.02.2.01	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.190.918.000	1.776.918.000	586.000.000
7.01.02.2.01.0001	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	74.918.000	74.918.000	0
7.01.02.2.01.0002	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.116.000.000	1.702.000.000	586.000.000
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	82.126.000	82.126.000	0
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	82.126.000	82.126.000	0
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	29.088.000	29.088.000	0
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	29.088.000	29.088.000	0
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.950.000	23.950.000	0
7.01.05	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.430.444.920	1.542.172.920	111.728.000
7.01.05.2.01	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.430.444.920	1.542.172.920	111.728.000
7.01.05.2.01.0001	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	257.417.920	257.417.920	0
7.01.05.2.01.0004	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.061.299.000	1.061.299.000	0
7.01.05.2.01.0008	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	111.728.000	223.456.000	111.728.000
7.01.1.03.2.11.04.0001	7.01.1.03.2.11.04.0001 KELURAHAN REMPAANG CATE	525.061.880	528.950.960	3.889.080
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	229.165.880	233.054.960	3.889.080
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.652.000	121.088.000	15.436.000
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.354.000	23.300.000	20.946.000
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.488.000	94.988.000	-7.500.000

7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	810.000	2.800.000	1.990.000
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.513.880	111.966.960	-11.546.920
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.600.000	28.200.000	-12.400.000
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.913.880	83.766.960	853.080
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	295.896.000	295.896.000	0
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	217.000.000	217.000.000	0
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.000.000	17.000.000	0
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	200.000.000	0
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	78.896.000	78.896.000	0
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.958.000	12.958.000	0
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	0
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	0
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	0
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	0
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	0
7.01.1.03.2.11.04.0002	7.01.1.03.2.11.04.0002 KELURAHAN SIJANTUNG	2.890.865.260	2.835.723.540	-55.141.720
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	280.720.400	225.578.680	-55.141.720
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.688.000	121.088.000	15.400.000
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.390.000	23.300.000	20.910.000
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.488.000	94.988.000	-7.500.000
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	810.000	2.800.000	1.990.000
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.032.400	104.490.680	-70.541.720
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.600.000	28.200.000	-12.400.000
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.432.400	76.290.680	-58.141.720
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.610.144.860	2.610.144.860	0

7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.531.248.860	2.531.248.860	0
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.000.000	17.000.000	0
7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.466.796.860	2.466.796.860	0
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47.452.000	47.452.000	0
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	78.896.000	78.896.000	0
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.958.000	12.958.000	0
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	0
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	0
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	0
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	0
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	0
7.01.1.03.2.11.04.0003	7.01.1.03.2.11.04.0003 KELURAHAN SUBANG MAS	2.925.421.556	2.929.066.916	3.645.360
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	247.669.050	251.314.410	3.645.360
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.347.450	137.347.450	3.000.000
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.353.750	2.353.750	0
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.184.000	134.184.000	3.000.000
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	809.700	809.700	0
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.321.600	113.966.960	645.360
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.200.000	30.200.000	0
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.121.600	83.766.960	645.360
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.677.752.506	2.677.752.506	0
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.599.166.506	2.599.166.506	0
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.034.000	15.034.000	0

7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.514.428.506	2.514.428.506	0
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69.704.000	69.704.000	0
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	78.586.000	78.586.000	0
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.648.000	12.648.000	0
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	0
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	0
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	0
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	0
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	0
7.01.1.03.2.11.04.0004	7.01.1.03.2.11.04.0004 KELURAHAN AIR RAJA	2.696.340.849	2.699.767.389	3.426.540
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	205.894.890	209.321.430	3.426.540
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.237.950	137.237.950	3.000.000
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.244.250	2.244.250	0
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.184.000	134.184.000	3.000.000
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	809.700	809.700	0
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.656.940	72.083.480	426.540
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.200.000	30.200.000	0
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.456.940	41.883.480	426.540
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.490.445.959	2.490.445.959	0
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.411.859.959	2.411.859.959	0
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.805.160	15.805.160	0
7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.327.322.799	2.327.322.799	0
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.732.000	68.732.000	0

7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	78.586.000	78.586.000	0
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.648.000	12.648.000	0
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	0
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	0
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	0
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	0
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	0
7.01.1.03.2.11.04.0005	7.01.1.03.2.11.04.0005 KELURAHAN SEMBULANG	634.450.650	638.350.650	3.900.000
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	280.444.650	284.344.650	3.900.000
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.412.250	115.489.050	10.076.800
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.244.250	17.701.050	15.456.800
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.488.000	94.988.000	-7.500.000
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	680.000	2.800.000	2.120.000
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.032.400	168.855.600	-6.176.800
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.600.000	33.523.200	-7.076.800
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.432.400	135.332.400	900.000
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	354.006.000	354.006.000	0
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	275.420.000	275.420.000	0
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.000.000	17.000.000	0
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	258.420.000	258.420.000	0
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	78.586.000	78.586.000	0
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.648.000	12.648.000	0

7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	0
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	0
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	0
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	0
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	0
7.01.1.03.2.11.04.0006	7.01.1.03.2.11.04.0006 KELURAHAN KARAS	3.001.595.101	2.978.140.981	-23.454.120
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	336.948.980	313.494.860	-23.454.120
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.213.500	137.213.500	3.000.000
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.219.500	2.219.500	0
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.184.000	134.184.000	3.000.000
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	810.000	810.000	0
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.735.480	176.281.360	-26.454.120
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.200.000	30.200.000	0
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.535.480	146.081.360	-26.454.120
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.664.646.121	2.664.646.121	0
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.586.060.121	2.586.060.121	0
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.000.000	17.000.000	0
7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.523.360.121	2.523.360.121	0
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	45.700.000	45.700.000	0
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	78.586.000	78.586.000	0
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.648.000	12.648.000	0
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	0

7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	0
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	0
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	0
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	0
7.01.1.03.2.11.04.0007	7.01.1.03.2.11.04.0007 KELURAHAN PULAU ABANG	2.704.867.350	2.709.020.430	4.153.080
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	292.112.930	296.266.010	4.153.080
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.188.250	137.188.250	3.000.000
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.194.250	2.194.250	0
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.184.000	134.184.000	3.000.000
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	810.000	810.000	0
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.924.680	159.077.760	1.153.080
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.200.000	30.200.000	0
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.724.680	128.877.760	1.153.080
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.412.754.420	2.412.754.420	0
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.333.640.420	2.333.640.420	0
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.534.000	16.534.000	0
7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.260.470.420	2.260.470.420	0
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	56.636.000	56.636.000	0
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	79.114.000	79.114.000	0
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	13.176.000	13.176.000	0
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	0

7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	0
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	0
7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	0
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	0
7.01.1.03.2.11.04.0008	7.01.1.03.2.11.04.0008 KELURAHAN GALANG BARU	2.923.212.880	2.898.605.680	-24.607.200
7.01.01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	190.948.300	166.341.100	-24.607.200
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.537.500	115.489.500	9.952.000
7.01.01.2.06.0002	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.239.500	17.701.500	15.462.000
7.01.01.2.06.0004	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.488.000	94.988.000	-7.500.000
7.01.01.2.06.0005	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	810.000	2.800.000	1.990.000
7.01.01.2.08	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.410.800	50.851.600	-34.559.200
7.01.01.2.08.0002	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.600.000	33.648.000	-6.952.000
7.01.01.2.08.0004	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.810.800	17.203.600	-27.607.200
7.01.03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.732.264.580	2.732.264.580	0
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.653.678.580	2.653.678.580	0
7.01.03.2.02.0001	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.824.000	16.824.000	0
7.01.03.2.02.0002	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.588.638.580	2.588.638.580	0
7.01.03.2.02.0003	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.216.000	48.216.000	0
7.01.03.2.06	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	78.586.000	78.586.000	0
7.01.03.2.06.0003	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.648.000	12.648.000	0
7.01.03.2.06.0005	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	0
7.01.03.2.06.0006	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	0
7.01.03.2.06.0007	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	0

7.01.03.2.06.0008	7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	0
7.01.03.2.06.0009	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	0

BAB IV**PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galang Kota Batam tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun-tahun sebelumnya, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Galang Kota Batam akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Galang Kota Batam dimana implikasinya Kecamatan Galang Kota Batam akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisasi RENJA yang ada, Kecamatan Galang Kota Batam akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Galang Kota Batam dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja ini

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Galang Kota Batam disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Galang Kota Batam tahun 2024 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Galang Kota Batam.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

L A M P I R A N



PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN GALANG

Kantor : Jl. Batin Limat Sembulang - Galang
B A T A M

KEPUTUSAN CAMAT GALANG KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 002 /CGL / PROG - KEU / VII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GALANG KOTA BATAM TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galang Kota Batam tahun 2021-2024, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galang ;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galang Kota Batam, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Camat Galang Kota Batam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Walikota Batam Nomor Kpts.69.1/HK/I /2017 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galang Kota Batam
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galang Kota Batam, terdiri dari pejabat dilingkungan Kecamatan Galang Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Galang Kota Batam, dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sembulang
Pada Tanggal : 15 Juli 2024



UTE RAMBE, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730503 199403 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GALANG KOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 008 / CGL / PROG - KEU / VII / 2024
TANGGAL : 15 Juli 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN GALANG KOTA BATAM TAHUN 2024

NO	JABATAN		JABATAN DALAM TIM	
1	CAMAT GALANG		PENGARAH	
2	SEKRETARIS KECAMATAN		PENANGGUNG JAWAB	
3	KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN GALANG		SEKRETARIS	
I.	PENGOLAHAN DATA BIDANG UMUM & KEPEGAWAIAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ASIAH	19650623 200701 1 015	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Koordinator

2	Baharuddin	19691117 200701 1 024	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
---	------------	-----------------------	------------------------------	---------

II. PENGOLAHAN DATA BIDANG PEMERINTAHAN

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Syahrial, SE	19731123 200604 1 007	Kasi Pemerintahan	Koordinator

III. PENGOLAHAN DATA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Mujamil, S.Sos	19690616 201001 1 002	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinator
2	Adi Putra, S.IP	19810812 201212 1 003	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Anggota

IV. PENGOLAHAN DATA BIDANG PELAYANAN UMUM

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Alowadodo Telaumbanua, SKM	19681105 199103 1 005	Kasi Pelayanan Umum	Koordinator
2	Herli YUSDINA Aritonang	19720921 200312 2 006	Analisa Pelayanan	Anggota

V.	PENGOLAHAN DATA BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Armaizal,ST	19670510 199203 1 018	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Koordinator
2	Asiah, S.IP	19730929 201001 2 004	Pengelola Data	Anggota
VI.	PENGOLAHAN DATA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Aris Tiyanto, SE	19690328 200801 1 005	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator
2	Zahratul Aini	19841206 201001 2 004	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagan	Anggota



KECAMATAN GALANG
LUTE RAMBE, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730503 199403 1 011

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Batam

No	Jenis Kegiatan	HasilPengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindakan Perbaikan / T
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.		√		
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		√		
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		√		
10. a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√		
10. b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10. c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-	√			

No	JenisKegiatan	HasilPengendaliandanEvaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		√		
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				



KECAMATAN GALANG
UTERAMBE, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730503 199403 1 011

